

ABSTRAK

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP EFEKTIVITAS

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

(Studi pada BPKAD Kabupaten Malang)

Oleh:

Afrizal Ahmad Abrar

Dosen Pembimbing:

Nurkholis, Ph.D., Ak., CA.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh unsur-unsur dari SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan kuesioner dengan metode *simple random sampling*. Sampel pada penelitian ini adalah pegawai BPKAD Kabupaten Malang yang berjumlah 88 orang. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian dan pemantauan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi Dan Komunikasi, Pemantauan, Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF INTERNAL CONTROL SYSTEM ON THE EFFECTIVENESS OF THE FINANCIAL MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENTS

(A Study on the Office for Management of Regional Finance and Assets of Regency of Malang)

By:

Afrizal Ahmad Abrar

Advisor:

Nurkholis, Ph.D., Ak., CA.

The objective of this study is to assess the influence of Governmental Internal Control System components, i.e. control environment, risk assessment, controlling activities, information and communication, and surveillance on the effectiveness of local government's financial management. The data of this study are collected through questionnaires distributed to 88 officers of the Office for Management of Regional Finance and Assets of Regency of Malang selected through simple random sampling. The data are analyzed through multiple linear regression analysis using SPSS. The results show that control environment, risk assessment, controlling activities, and surveillance significantly influence the effectiveness of local government's financial management, but information and communication do not influence it.

Keywords: *control environment, risk assessment, controlling activities, information and communication, surveillance, effectiveness of local government's financial management.*

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi, krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa pada tingkat kemiskinan, namun di sisi yang lain, krisis tersebut dapat juga memberi “berkah tersembunyi” (*blessing in disguised*) bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Mengapa? Karena krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Tema sentral reformasi total tersebut adalah mewujudkan masyarakat madani, terciptanya *good governance* dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan (Mardiasmo, 2002:3).

Salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi daerah. Terdapat dua sudut pandang tentang otonomi daerah ini yaitu merupakan tantangan bagi pemerintah daerah itu sendiri dalam mengelola daerahnya secara mandiri dan juga dapat menjadi peluang dalam memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki. Kebijakan ini dibuat atas dasar bahwa daerah dianggap lebih memahami dan mengetahui tentang keadaan daerahnya sendiri dari pada pemerintah pusat dan agar lebih dekat kepada masyarakat sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih maksimal. Otonomi daerah juga mengharapakan pemerintah daerah mampu melakukan pembangunan daerah secara mandiri mulai dari perencanaan, pembiayaan dan pembangunannya.

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Seperti sudah

diketahui, anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2002:9).

Untuk menciptakan efektivitas pengelolaan keuangan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat mewujudkan hal tersebut berupa sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No.60 Tahun 2008). Instansi pemerintah harus memiliki sistem pengendalian intern yang baik. Seringkali terjadinya berbagai kasus korupsi, penyelewengan keuangan negara, pemborosan anggaran, inefisiensi organisasi dan kualitas laporan keuangan yang buruk salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya sistem pengendalian intern. Organisasi yang semakin besar dan kompleks serta perkembangan pesat teknologi informasi yang pada satu sisi memberikan keuntungan tetapi pada sisi

yang lain juga meningkatkan risiko pengendalian dan keamanan sehingga mutlak diperlukan sistem pengendalian yang andal (Mahmudi, 2016:251).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa skripsi dengan judul **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi pada BPKAD Kabupaten Malang).**

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Definisi sistem pengendalian intern menurut Mahmudi (2016:252) adalah suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat incidental dan responsive atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus-menerus. Sedangkan definisi sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Dari beberapa pengertian pengendalian intern di atas, dapat disimpulkan pengendalian intern adalah sebuah sistem, kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh manajemen untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya. Tujuan yang dimaksud adalah keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta

efektivitas dan efisiensi operasi.

Unsur Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terdiri dari lima unsur yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku yang positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya
2. Penilaian risiko
Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri dari:
 - a. Identifikasi risiko.
 - b. Analisis risiko.
3. Kegiatan pengendalian
Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan.
4. Informasi dan komunikasi
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat secara efektif.
5. Pemantauan
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Teori COSO

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) menerbitkan *Intern Control – Integrated Framework* tahun 1994 yang mengemukakan bahwa pengendalian intern merupakan pengendalian kegiatan (operasional) perusahaan yang dilakukan pimpinan perusahaan untuk mencapai tujuan secara efisien, yang terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu dari operasi perusahaan. *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* mengenalkan bahwa terdapat 5 (lima) komponen kebijakan dan prosedur yang didesain dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian intern dapat dicapai. Kelima komponen pengendalian intern tersebut adalah:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*).
2. Penilaian Risiko Manajemen (*Management Risk Assessment*).
3. Sistem Komunikasi dan Informasi Akuntansi (*Accounting Information and Communication System*).
4. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*).
5. Pemantauan (*Monitoring*).

Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum adalah tercapainya hasil yang sudah ditetapkan. Untuk pemerintah daerah dikatakan efektif apabila tujuan dari pemerintah daerah tersebut tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengertian efektivitas tersebut sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4 yaitu pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran

dengan hasil. Menurut mardiasmo (2002:134) definisi efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuan tersebut dikatakan telah berjalan efektif.

Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Pasal 1 Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Menurut Halim (2011:2) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Negara dan daerah dalam arti manajemen keuangan negara dan daerah pada hakikatnya adalah pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan yang lebih dikenal dengan APBN dan APBD. APBN dan APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan negara dan daerah yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang (dan peraturan daerah).

Dari pengertian di atas, pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasannya, termasuk juga perubahan atas APBD tersebut. Pengelolaan keuangan daerah dijalankan berdasarkan peraturan daerah.

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan tercapainya tujuan dari pengelolaan keuangan daerah antara lain tanggung jawab, mampu memenuhi

kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna dan kegiatan yang efektif dan efisien, dan pengendalian.

Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Halim (2004:84) mengemukakan tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab (*accountability*), pemerintah daerah harus memertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah.
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan, keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi ikatan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Kejujuran, urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.
4. Hasil guna dan kegiatan efisien dan efektif, program dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan dalam waktu yang singkat.
5. Pengendalian, aparat pengawasan harus melakukan pengendalian agar tujuan dapat tercapai.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat antar variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan horizon waktu cross-sectional di mana data hanya dikumpulkan sekali selama penelitian berlangsung. Metode yang digunakan yaitu metode survei terhadap responden. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berada di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang yang berjumlah 112

orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan di dapat hasil 88. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa nilai dari jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Untuk menguji data peneliti menggunakan aplikasi statistik *Statistical Package for Social Science (SPSS)* versi 13.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reabilitas

Tabel 1 Uji Validitas Variabel SPIP

Item	Sig.	Keterangan
X1.1	0.000	Valid
X1.2	0.000	Valid
X1.3	0.000	Valid
X1.4	0.000	Valid
X1.5	0.000	Valid
X1.6	0.000	Valid
X1.7	0.000	Valid
X1.8	0.000	Valid
X2.1	0.000	Valid
X2.2	0.000	Valid
X2.3	0.000	Valid
X3.1	0.000	Valid
X3.2	0.000	Valid
X3.3	0.000	Valid
X3.4	0.000	Valid
X3.5	0.000	Valid
X3.6	0.000	Valid
X3.7	0.000	Valid
X4.1	0.000	Valid
X4.2	0.000	Valid
X5.1	0.000	Valid
X5.2	0.000	Valid
X5.3	0.000	Valid

Sumber: Data primer, diolah 2017

Tabel 2 Uji Validitas Variabel Efektifitas PKD

Item	Sig.	Keterangan
Y1	0.000	Valid
Y2	0.000	Valid
Y3	0.000	Valid
Y4	0.000	Valid
Y5	0.000	Valid
Y6	0.000	Valid
Y7	0.000	Valid
Y8	0.000	Valid
Y9	0.000	Valid
Y10	0.000	Valid

Sumber: Data primer, diolah 2017

Dari Tabel 1 dan Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa nilai sig. r indikator pertanyaan lebih kecil dari 0.05 ($\alpha = 0.05$) yang berarti tiap-tiap indikator variabel adalah valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian

Tabel 3 Uji Reliabilitas Variabel

No	Variabel	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
1	X1	0.848	Reliabel
2	X2	0,814	Reliabel
3	X3	0,802	Reliabel
4	X4	0,643	Reliabel
5	X5	0,782	Reliabel
6	Y	0.874	Reliabel

Sumber: Data primer, diolah 2017

Dari Tabel 3 diketahui bahwa nilai dari alpha cronbach untuk semua variabel lebih besar dari 0,6. Dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya maka semua variabel yang digunakan untuk penelitian sudah reliabel.

Uji Asumsi Klasik Regresi

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		88
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.56754282
Most Extreme Differences	Absolute	.142
	Positive	.142
	Negative	-.087
Kolmogorov-Smirnov Z		1.331
Asymp. Sig. (2-tailed)		.058

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer, 2017

Dari hasil perhitungan Tabel 3 didapat nilai sig.sebesar 0.058 atau lebih besar dari 0.05, maka ketentuan H_0 diterima yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

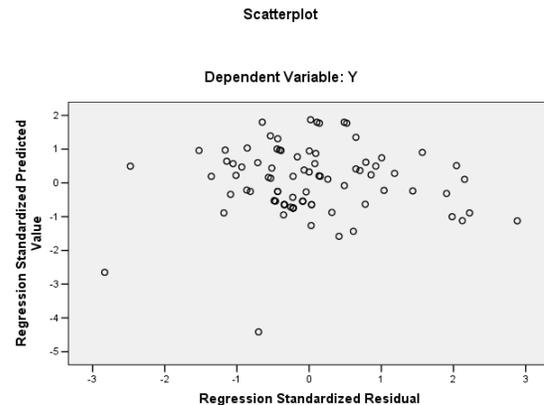
Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Bebas	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	0.419	2.385
X2	0.377	2.655
X3	0.315	3.170
X4	0.655	1.528
X5	0.699	1.431

Sumber: Data primer, diolah 2017

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance yang lebih kecil dari 0,1. Sehingga dari hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

Gambar 1 Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data primer, diolah 2017

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan scatterplot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat dikatakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudah layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan.

Persamaan Regresi

Dari pengolahan data statistik didapatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 5,486 + 0,323 X_1 + 0,690X_2 + 0,325X_3 + 0,092X_4 + 0,554X_5$$

Persamaan yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 5,486. Hal ini berarti bahwa jika variabel independen adalah nol, maka nilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar konstanta 5,486.

2. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,323 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_1 (Lingkungan Pengendalian).
3. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,690 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_2 (Penilaian Risiko).
4. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,325 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_3 (Kegiatan Pengendalian).
5. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,092 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_4 (Informasi dan Komunikasi).
6. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,554 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_5 (Pemantauan).

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5 Koefisien Korelasi dan Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0.780	0.608	0.584

Sumber : Data primer, diolah 2017

Dari analisis pada Tabel 5 diperoleh hasil adjusted R (koefisien determinasi) sebesar 0,584. Artinya bahwa 58,4% variabel Efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Lingkungan Pengendalian (X_1), Penilaian Risiko (X_2), Kegiatan Pengendalian (X_3), Informasi dan Komunikasi (X_4), Pemantauan (X_5). Sedangkan sisanya 41,6% variabel Efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi

dan Komunikasi, Pemantauan, terhadap variabel Efektivitas pengelolaan keuangan daerah, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,780, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu Lingkungan Pengendalian (X_1), Penilaian Risiko (X_2), Kegiatan Pengendalian (X_3), Informasi dan Komunikasi (X_4), Pemantauan (X_5) dengan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah termasuk dalam kategori sangat kuat.

Uji F

Tabel 6 Uji F/Serempak

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	889.370	5	177.874	25.431	0.000
Residual	573.528	82	6.994		
Total	1462.898	87			

Sumber: Data primer, diolah 2017

Berdasarkan Tabel 4.13 nilai F hitung sebesar 25,431. Sedangkan F tabel ($\alpha = 0.05$; db regresi = 5 : db residual = 82) adalah sebesar 2,326. Karena F hitung > F tabel yaitu 25,431 > 2,326 atau nilai Sig. F ($0,000 < \alpha = 0.05$ maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas (Lingkungan Pengendalian(X_1), Penilaian Risiko (X_2), Kegiatan Pengendalian (X_3), Informasi dan Komunikasi (X_4), Pemantauan (X_5)) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Efektivitas pengelolaan keuangan daerah).

Uji t

Tabel 7 Koefisien Regresi Dan Uji Hipotesis

Variabel Bebas	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.486	3.791		1.447	0.152
X1	0.323	0.150	0.230	2.153	0.034
X2	0.690	0.291	0.267	2.372	0.020
X3	0.325	0.161	0.249	2.024	0.046
X4	0.092	0.361	0.022	0.255	0.799
X5	0.554	0.270	0.170	2.053	0.043

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh hasil:

1. t test antara X₁ (lingkungan pengendalian) dengan Y (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) menunjukkan t hitung = 2,153. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 82) adalah sebesar 1,989. Karena t hitung > t tabel yaitu 2,153>1,989 atau sig. t (0,034) < $\alpha = 0.05$ hal ini berarti H₀ ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dipengaruhi secara signifikan oleh lingkungan pengendalian.
2. t test antara X₂ (penilaian risiko) dengan Y (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) menunjukkan t hitung = 2,372. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 82) adalah sebesar 1,989. Karena t hitung > t tabel yaitu 2,372>1,989 atau sig. t (0,020) < $\alpha = 0.05$ maka pengaruh X₂ (penilaian risiko) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H₀ ditolak dan H_a sehingga dapat disimpulkan bahwa Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Penilaian.
3. t test antara X₃ (kegiatan pengendalian) dengan Y (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) menunjukkan t hitung = 2,024. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 82) adalah sebesar 1,989. Karena t hitung > t tabel yaitu 2,024>1,989 atau sig. t (0,046) < $\alpha = 0.05$ maka pengaruh X₃ (kegiatan pengendalian) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H₀ ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dipengaruhi secara signifikan oleh kegiatan pengendalian.
4. t test antara X₄ (informasi dan komunikasi) dengan Y (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) menunjukkan t hitung = 0,255. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 82) adalah sebesar 1,989. Karena t hitung < t tabel yaitu 0,255<1,989 atau sig. t (0,799) > $\alpha = 0.05$ maka pengaruh X₄ (informasi dan komunikasi) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah tidak signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H₀ diterima dan H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah tidak dipengaruhi secara signifikan oleh informasi dan komunikasi.
5. t test antara X₅ (pemantauan) dengan Y (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) menunjukkan t hitung = 2,053. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 82) adalah sebesar 1,989. Karena t hitung > t tabel yaitu 2,053>1,989 atau sig. t (0,043) < $\alpha = 0.05$ maka pengaruh X₅ (pemantauan) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H₀ ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan

bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dipengaruhi secara signifikan oleh pemantauan.

Pembahasan

Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan yang positif signifikan antara lingkungan pengendalian dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari t test antara X_1 (lingkungan pengendalian) dengan Y (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) menunjukkan t hitung > t tabel yaitu $2,153 > 1,989$ atau sig. t (0,034) $< \alpha = 0.05$. Sehingga pengaruh antara lingkungan pengendalian dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah semakin baik lingkungan pengendalian maka pengelolaan keuangan daerah akan semakin efektif.

Dari analisis regresi linier berganda dapat dilihat bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,323 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_1 (lingkungan pengendalian). Jadi apabila lingkungan pengendalian mengalami peningkatan satu satuan, maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,323 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizaldi dan Yurniwati (2015) yang menemukan bahwa penciptaan lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif akan memberikan kontribusi besar bagi tegaknya SPIP yang pada akhirnya memberikan jaminan akuntabilitas bagi *stakeholder* pemerintah daerah bahwa *good government* telah dilaksanakan di pemerintah daerah tersebut.

Pengaruh Penilaian Risiko Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapat nilai koefisien regresi dari penilaian risiko yaitu sebesar 0.690, maka pengaruh yang di dapat dari penilaian risiko terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah positif. Pengujian t test antara X_2 (penilaian risiko) dengan Y (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) didapat t hitung > t tabel yaitu $2,372 > 1,989$ atau sig. t (0,020) $< \alpha = 0.05$, menunjukkan pengaruh X_2 (penilaian risiko) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti pengaruh antara penilaian risiko dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah semakin baik penilaian risiko maka pengelolaan keuangan daerah akan semakin efektif.

Dari analisis regresi linier berganda dapat dilihat bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,690 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_2 (penilaian risiko). Jadi apabila penilaian risiko mengalami peningkatan satu satuan, maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0.690 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

Hasil serupa juga didapat Herawati (2014) dalam penelitiannya yang mendapatkan hasil bahwa penilaian risiko berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Kegiatan Pengendalian Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapat nilai koefisien regresi dari kegiatan pengendalian yaitu sebesar 0.325, maka pengaruh yang di dapat dari kegiatan pengendalian terhadap efektivitas

pengelolaan keuangan daerah adalah positif. Pengujian t test antara X_3 (kegiatan pengendalian) dengan Y (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) didapat t hitung $> t$ tabel yaitu $2,024 > 1,989$ atau sig. t $(0,046) < \alpha = 0,05$, menunjukkan pengaruh X_3 (kegiatan pengendalian) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti pengaruh antara penilaian risiko dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah semakin baik kegiatan pengendalian maka pengelolaan keuangan daerah akan semakin efektif.

Dari analisis regresi linier berganda dapat dilihat bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,325 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_3 (kegiatan pengendalian). Jadi apabila kegiatan pengendalian mengalami peningkatan satu satuan, maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0.325 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tahir (2015) yang menemukan bahwa kegiatan pengendalian berpengaruh signifikan dan positif terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Pengaruh Informasi Dan Komunikasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapat nilai koefisien regresi dari informasi dan komunikasi yaitu sebesar 0.092, maka pengaruh yang di dapat dari informasi dan komunikasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah positif. Pengujian t test antara X_4 (informasi dan komunikasi) dengan Y (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) didapat t hitung $< t$ tabel yaitu $0,255 < 1,989$ atau sig. t $(0,799) > \alpha = 0,05$ maka pengaruh

X_4 (informasi dan komunikasi) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah tidak signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 diterima. Sehingga peningkatan informasi dan komunikasi belum tentu akan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Dari analisis regresi linier berganda dapat dilihat bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,092 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_4 (informasi dan komunikasi). Jadi apabila informasi dan komunikasi mengalami peningkatan satu satuan, maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0.092 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

Informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah disebabkan karena indikator-indikator pada penelitian ini untuk variabel informasi dan komunikasi belum diterapkan secara maksimal pada BPKAD Kabupaten Malang. BPKAD Kabupaten Malang belum memaksimalkan *website* sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan atau belum adanya sistem informasi yang berfungsi dengan baik yang dapat membantu meyakinkan bahwa tanggung jawab telah dilaksanakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2016) yang menemukan bahwa informasi dan komunikasi tidak berpengaruh positif terhadap opini laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga mendukung Penelitian yang dilakukan oleh Tirmizi (2016) yang memperoleh hasil bahwa informasi dan komunikasi yang diterapkan di SKPD Kota Padang berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh Pemantauan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapat nilai koefisien regresi dari pemantauan yaitu sebesar 0.554, maka pengaruh yang di dapat dari pemantauan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah positif. Pengujian t test antara X_5 (pemantauan) dengan Y (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) didapat t hitung $> t$ tabel yaitu $2,053 > 1,989$ atau sig. t $(0,043) < \alpha = 0,05$, menunjukkan pengaruh X_5 (pemantauan) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti pengaruh antara pemantauan dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah semakin baik pemantauan maka pengelolaan keuangan daerah akan semakin efektif.

Dari analisis regresi linier berganda dapat dilihat bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,554 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_5 (pemantauan). Jadi apabila pemantauan mengalami peningkatan satu satuan, maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0.554 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini sejalan dengan hasil yang diperoleh Adam dan Suzan (2015) dalam penelitiannya yaitu pemantauan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap

efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Secara bersama-sama unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa semakin baik pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah pengelolaan keuangan daerah akan semakin efektif.
2. Lingkungan pengendalian berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Penilaian risiko berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Kegiatan pengendalian berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
5. Informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
6. Pemantauan berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas daerah penelitian dan juga menambah jumlah responden.
2. Disarankan penelitian selanjutnya untuk menemukan dan menambah variabel bebas yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini seperti sistem informasi akuntansi, pengawasan fungsional, dan kinerja pegawai.
3. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain seperti wawancara dan observasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Okky Faisal, dan Suzan, Leny. 2015. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2016. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015, (Online), (<http://www.bpk.go.id/>, diakses 10 September 2017).
- COSO, 1994. *Internal Control Integrated Framework*. New York: AIGPA's Publication Division
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
- Halim, Abdul, dan Bawono, Icuk Rangga. 2011. *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM
- Herawati, Tuti. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). Study and Accounting Research Bandung Business School.
- Irawan, RD Hepzi. 2016. Analisis Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Lamusu, Lusiana. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta :ANDI.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta :ANDI.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.

- Nugroho, Tomi. 2012. Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Studi Kasus Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Kota Administrasi Jakarta Utara. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rizaldi, Afdhal, dan Yurniwati. 2015. Analisis Lingkungan Pengendalian (Control Environment), Studi Kasus Pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Padang Panjang. Universitas Andalas.
- Saleba, Siti Nurjannah. 2014. Pengaruh Sistem pengendalian Intern Pemerintah dan Kopetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanaudin Makasar.
- Santoso, Eli Budi. 2016. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur). Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Simanungkalit, Anggelina AP. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Gorontalo). Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Muhammad. 2015. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nduga Provinsi Papua. Tugas Akhir Program Magister Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Terbuka.
- Tarmizi, Zulkifli Abdurachman. 2016. Pengaruh Penerapan Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Pencegahan Fraud Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Kota Padang. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Tony, Triyulianto. 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bersama Kita Bisa Menyongsong Masa Depan BPKP yang Lebih Cerah. Bulletin Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Vol. 1, No. 4, 24 Oktober 2008.

_____. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

_____. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

_____. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Zalni, Fitri. 2013. Pengaruh Komitmen Karyawan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada DPKD Pemerintah Kota di Sumatera Barat). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.